

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai kehidupan yang makmur dan berkeadilan didalam suatu negara. Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat, perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor (Widiarto, 2001).

Pembangunan ekonomi mensyaratkan Gross national Product (GNP) yang tinggi, maka untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil yang telah diperoleh. Ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor di negara Indonesia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan menurunnya angka pendapatan perkapita, inflasi terhadap uang tidak diikuti secara proporsional dengan produksi, pembangunan yang tidak merata, investasi yang masih banyak

padat modal, memburuknya nilai tukar, dan hancurnya industry di dalam negeri. Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat (Winarno, 1998). Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah.

Dalam pengukuran ketimpangan pendapatan wilayah digunakan Gini Rario. Koefisien gini merupakan ukuran ketidak merataan agregat, koefisien gini diambil dari nama ahli statistika italia yang bernama C.Gini yang menemukan rumus tersebut tahun 1912. Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (Kemerataan sempurna) sampai 1 (Ketidak merataan sempurna). Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi antar provinsi maupun antar negara, tetapi juga antar kabupaten/kota. Di Provinsi Jambi antar kabupaten/kota memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup memprihatinkan. Provinsi Jambi terdiri atas 9 Kabupaten dan 2 Kota yang masing-masing provinsi tersebut memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah.

Gini ratio menjelaskan apabila indeks ketimpangan lebih dari 1 menunjukkan daerah tersebut semakin timpang, sebaliknya apabila nilai indeks mendekati 0 maka semakin merata (Jaime Bonet,2006). Dari tahun 2016-2018 tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota, dan ada juga yang mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tingkat ketimpangan tertinggi berada di Kabupaten Sarolangun, Muaro Jambi dan

Bungo sebesar 0,34, ditahun 2017 berada di Kota Jambi sebesar 0,39 dan di tahun 2018 berada di kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,36. Sedangkan ketimpangan paling rendah pada tahun 2016 berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 0,26, pada tahun 2017 berada di kabupaten Batanghari sebesar 0,25, dan pada tahun 2018 di kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Timur sebesar 0,29. Hasil dari Gini Ratio menunjukkan, bahwa daerah di provinsi Jambi masih banyak daerah-daerah di provinsi Jambi yang tidak merata atau mengalami ketimpangan.

Ketidakterataan pendapatan antar daerah menyebabkan ketidakmerataan pembangunan ekonomi, sehingga terjadilah ketimpangan ekonomi. Karena perbedaan laju Pertumbuhan Ekonomi, maka dari itu diperlukanlah peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan daerah yang tertinggal agar pertumbuhan ekonomi dapat merata. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi, yang berdampak tidak meratanya investasi untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa Kab./Kota atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidak meratanya investasi diakibatkan adanya perbedaan potensi sumberdaya alam yang dimiliki setiap daerah kabupaten/kota Jambi, sehingga terjadinya daerah tertinggal dan daerah maju.

Permasalahan ketimpangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kemiskinan, biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk

meningkatkan perekonomian yang optimal dan menurunkan tingkat kemiskinan. Di setiap negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Indonesia demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan (Arius Jonaidi, 2012). Tingkat kemiskinan ini akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2016-2018. Pada tahun 2016-2018 tingkat kemiskinan terbesar di Provinsi Jambi berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 12,76, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,58, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi sebesar 12,38. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kota Sungai Penuh sebesar 2,76.

Tingkat kemiskinan di setiap daerah di provinsi Jambi terbilang cukup tinggi, hal ini mengakibatkan banyak daerah yang terbelakang dan sulit untuk maju karna tingkat kemiskinan yang sulit untuk diatasi. Tidak hanya tingkat kemiskinan yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antar wilayah, faktor IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat

ketimpangan. Perbedaan sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah juga berpengaruh terhadap ketimpangan, dimana kualitas SDM diukur melalui IPM. Tinggi dan rendahnya IPM akan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatan penduduk. Perbedaan nilai IPM di setiap daerah mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Perkembangan Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan IPM di Provinsi Jambi tahun 2016-2018. Pada tahun 2016-2018 Kota Jambi nilai IPM tertinggi, sedangkan kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan nilai IPM terendah di provinsi Jambi. Tingkat IPM tahun 2016 sebesar 76,14%, pada tahun 2017 tingkat sebesar 76,74%, pada tahun 2018 tingkat IPM sebesar 77,41%. Sedangkan tingkat IPM terendah berada di kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 63,32%.

Selain IPM yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan antar wilayah, faktor perbedaan demografi (pengangguran) juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan. Tingkat pengangguran berdampak positif terhadap ketimpangan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pengangguran disuatu daerah, maka tingkat ketimpangan pembangunan akan semakin tinggi.

Perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2016-2018. Pada tahun 2016-2018 tingkat pengangguran terbesar di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbesar berada di Kota Jambi sebesar 9,94, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,55, dan pada tahun 2018 tingkat pengangguran meningkat menjadi sebesar 6,56.

Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Tebo sebesar 2,07.

Selain tingkat pengangguran, yang mempengaruhi ketimpangan yaitu tidak meratanya pendapatan daerah juga memiliki peranan dalam mempengaruhi tingkat ketimpangan. Ketimpangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, apabila pendapatan asli daerah meningkat maka ketimpangan menurun begitu juga sebaliknya apabila pendapatan asli daerah menurun maka ketimpangan meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Dwi Sundi (2013), peran PAD sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah, karena merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan yang semakin membesar antar daerah. Untuk mengatasi masalah ketimpangan diperlukan dana perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Azzumar, 2011).

Pada tahun 2016-2018 pendapatan asli daerah di provinsi Jambi tidak merata, hal ini mengakibatkan ketimpangan wilayah antar daerah. Pada tahun 2016-2018 pendapatan asli daerah tertinggi di provinsi Jambi adalah Kota Jambi. Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah di Kota Jambi sebesar Rp.287.564.677, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp.397.327.843, dan pada tahun 2018

mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.338.891.883. Sedangkan pendapatan asli daerah terendah adalah kota Sungai Penuh sebesar Rp.34.184.049.

Ketimpangan pendapatan wilayah sesuatu yang umum terjadi di daerah daerah Indonesia. Melihat ketimpangan yang cukup tinggi biasanya ditandai dengan banyaknya jumlah masyarakat miskin disuatu daerah tertentu. Dari fenomena diatas maka penulis ingin melihat seberapa besar ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Jambi melalui **“Analisis Pengaruh Kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/kota Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi yang berawal dari pembangunan yang terus meningkat karena kurangnya pemerataan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dari ketimpangan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan kemiskinan. Dari latar belakang yang telah disajikan dapat dirumuskan masalah dalam analisis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Kemiskinan, IPM, pengangguran, pendapatan asli daerah, dan ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan, IPM, pengangguran, dan pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perkembangan Kemiskinan, IPM, pengangguran, pendapatan asli daerah, dan ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan, IPM, pengangguran, dan pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Kajian penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Serta sebagai masukan bagi peneliti yang memiliki kajian yang sama, dan sebagai literature bagi kalangan akademis tentang penganalisisan pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran dan ketimpangan wilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi yang terkait dalam mengelola pembangunan daerah Provinsi Jambi. Dan sebagai masukan atau referensi para pengambil kebijakan, bagaimana memaksimalkan dalam pengelolaan daerah dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.